

	News Title : Lebih Cepat, Bursa CPO Siap Beroperasi Jumat, 20 Oktober 2023	
	Media Name : Pantau.com	Journalist : Ahmad Munjin
	Publish Date : 19 October 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Bursa CPO

Lebih Cepat, Bursa CPO Siap Beroperasi Jumat, 20 Oktober 2023

Oleh **Ahmad Munjin** — 2 jam yang lalu



Foto: Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko. (Antara/Maria Cicilia Galuh)

Pantau - Bursa Minyak Kelapa Sawit atau Bursa CPO siap beroperasi alias live mulai Jumat (20/10/2023). Kesiapan ini diungkapkan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko.

"Pokoknya besok, barusan ketemu sama direkturnya (Direktur ICDX). Besok, 20 (20 Oktober) ya, kan 23 (23 Oktober) paling lambat, lebih cepat lebih bagus," ujar Didid di sela-sela pameran Trade Expo Indonesia di Tangerang, Banten, Kamis (19/10/2023).

Beroperasinya Bursa CPO pada 20 Oktober 2023, lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Menurut Didid, Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) yang ditunjuk sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di bursa telah siap untuk melakukan transaksi.

Namun demikian, Didid menyampaikan bahwa pemain di Bursa CPO belum terlalu banyak. Sebab, Bursa CPO di Indonesia masih menjadi barang baru.

Menurut Didid, yang terpenting dalam Bursa CPO saat ini adalah terbentuk price discovery atau terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Setelah harga terbentuk, maka price reference atau harga acuan yang dipakai konsumen dapat terjadi.

"Jadi yang penting ada dulu, nanti kalau sudah mencapai volume yang baik dan continue tiap hari hingga akan menjadi price reference," kata Didid.

Kementerian Perdagangan melalui Bappebti meluncurkan Bursa CPO pada Jumat (19/10/2023). Pendirian bursa ini, diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai penentu harga minyak kelapa sawit dunia.

Selama ini harga acuan CPO Indonesia berdasarkan pada harga dari bursa Rotterdam dan Malaysia. Menurut Didid, Indonesia membutuhkan harga acuan sendiri yang lebih menggambarkan kebutuhan dalam negeri.